

# EVALUASI PELAKSANAAN SMART GOVERNANCE DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Refinda Chris Sherafi

NPP. 29.0984

*Asdaf Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: [refindacsherafi@gmail.com](mailto:refindacsherafi@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background:** *This thesis is entitled "Evaluation of the Implementation of Smart Governance in the City of Kediri, East Java Province". The COVID-19 pandemic has changed what was planned a lot, forcing the Government to make new innovations for the sake of good governance and the survival of the community. In this era of digitalization, the Government is trying to provide easy, effective, and efficient technology-based public services coordinated by the Department of Communication and Information of the City of Kediri on behalf of the Mayor of Kediri. So, not only the government, the people are also required to have modern thinking. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the realization of the implementation of Smart Governance in the City of Kediri, the factors that influence the process of implementing Smart Governance, and the efforts made by the Department of Communication and Information of the City of Kediri. **Method:** This study uses a qualitative research method with an inductive descriptive approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in analyzing the data is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **The Result/findings:** According to the results of the study, the City of Kediri in implementing the Smart Governance program has been going well, seen from the percentage of integrated applications that has increased from the previous year. In addition, there are also inhibiting factors that become a weak point in the running of this program. **Conclusion:** So that in the implementation of the Smart Governance program it is necessary to always be evaluated and updated.*

*Keywords ; Smart Governance, Service, Digitization*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Skripsi ini berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur”. Pandemi covid-19 telah banyak merubah apa yang sudah direncanakan, sehingga memaksa Pemerintah untuk membuat inovasi yang baru demi tata kelola pemerintahan yang baik dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam era digitalisasi kini Pemerintah berusaha memberikan pelayanan publik yang mudah, efektif, dan efisien berbasis teknologi yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri atas utusan Bapak Walikota Kediri. Sehingga, tidak hanya Pemerintah, masyarakatpun dituntut memiliki pemikiran yang modern. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan adalah unntuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan Smart Governance di Kota Kediri, faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan Smart Governance tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Menurut hasil penelitian bahwa Kota Kediri dalam pelaksanaan program Smart Governance sudah berjalan dengan baik dilihat dari prosentase aplikasi terintegrasi yang naik dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang menjadi titik kelemahan berjalannya program ini. **Kesimpulan:** Sehingga dalam pelaksanaan program Smart Governace perlu untuk selalu di evaluasi dan mendapat pembaharuan.

Kata Kunci ; Smart Governance, Pelayanan, Digitalisasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Zaman digitalisasi ini, teknologi berbasis digital berkembang cepat dan semakin canggih. Perkembangan teknologi begitu cepat yang mengharuskan pemerintah daerah atau kota dapat memanfaatkannya secara maksimal dalam pelayanan kepada masyarakatnya. Terdapat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional yang mengembangkan e-government membuktikan keseriusan pemerintah, selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE). Smart



City merupakan inovasi yang banyak dilakukan pemerintah daerah atau kota di Indonesia dalam aspek tata kelola pemerintahan. Dalam hal pengembangan e-government Kota Kediri menunjukkan keseriusannya dalam hal tersebut dibuktikan melalui adanya Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri merupakan salah satu dari banyak instansi lainnya yang berada di kelompok pemerintah daerah yang memberikan usaha demi mewujudkan misi Kota Kediri berkenaan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi. Bekerja sama dengan beberapa instansi atau organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program e-government di Kota Kediri sebagai tujuan untuk menciptakan Kota Kediri sebagai Smart City. Terdapat enam pilar menuju kota pintar yang terdiri dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment yang harus direalisasikan. Dalam mewujudkan perencanaan Smart City, Smart Governance menjadi fokus ujung tombak karena Smart City mustahil diwujudkan tanpa smart governance. Smart Governance sendiri merupakan suatu program yang 8 dijalankan untuk sebuah tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik yang bergerak melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Smart Governance memberikan tekanan terhadap peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang terjadi sehingga berdampak pada roadmap atau masterplan Smart City Kota Kediri khususnya dalam pilar Smart Governance yang telah disusun dikarenakan datangnya virus corona (COVID-19) dan menjadi pandemi membuat terbatasnya ruang gerak pemerintahan maupun masyarakat. Ibu Ayu selaku Kasi Tata Kelola mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan masterplan SPBE kita terdapat roadmap atau peta jalan, dimana akan menjadi rencana pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun, disaat pandemi COVID-19 ini banyak inovasi yang tidak sesuai dengan roadmap masterplan kita karena ada beberapa inovasi yang ditiadakan.” Hal tersebut menyebabkan perubahan pada masterplan smart city sehingga harus disesuaikan kembali dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Terlihat begitu penting 9 dan mendesaknya perubahan RPJMD yang menuntut setiap instansi yang mendukung harus melakukan yang terbaik dan maksimal. Pelaksanaan Smart Governance Kota Kediri termasuk dalam masterplan smart city juga mengalami perubahan. Hal tersebut merupakan fokus penelitian ini, sehingga akan dibahas lebih lanjut. Dalam penelitian ini akan meninjau proses pelaksanaan Smart Governance Kota Kediri, dan melihat sejauh mana Smart Governance telah diimplementasikan walaupun ditengah pandemi covid-19 yang melanda Kota Kediri.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, sebagai berikut:  
Penelitian Putri Maulida Jasmin yang berjudul Implementasi Smart Governance oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Qlue di Tahun 2019 memiliki hasil penelitian bahwa Aplikasi Qlue belum maksimal dalam melaksanakan implementasi smart governance dilihat dari jumlah laporan menurun, tidak meratanya tingkat koordinasi, market Fit belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta (Jasmin, 2020). Penelitian Irfan yang membahas tentang Pelaksanaan Smart Government di Kabupaten Soppeng memiliki hasil penelitian bahwa

Pelaksanaan smart government menggunakan internet untuk diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi ethernet untuk pemakaian internal(Irfan et al., 2018). Penelitian Syifa Burul Aini , Ernady Syaodih (Nurul Aini & Syaodih, 2019) berjudul Evaluasi Tingkat Pelaksanaan Konsep Smart City di Kota Bandung memiliki hasil penelitian Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pelaksanaan Konsep Smart City di Kota Bandung Smart Environment Kota Bandung sudah mencapai 55%, Smart Mobility mencapai 43%, Smart Government mencapai 61%, Smart Economy mencapai 53%, Smart People mencapai 67%, dan Smart Living mencapai 58%.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Smart Governance merupakan konsep yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah dan untuk memberikan inovasi-inovasi guna memajukan pelayanan kota tersebut. Pada penelitian terkait Implementasi Smart Governance oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Qlue di Tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemerintah perlu lebih lagi untuk menyelaraskan visi dan misi Smart City dari aspek efisiensi pelayanan publik dan efektivitas, perbedaannya dengan penelitian penulis penelitian ini hanya berfokus mengevaluasi program smart governance secara umum. Kemudian dalam penelitian Pelaksanaan Smart Government di Kabupaten Soppeng berfokus pada pengadaan jaringan internet di kantor-kantor dan tempat umum, perbedaan dengan penelitian ini penulis membahas mengenai pelaksanaan smart governance diberbagai bidang di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya Penelitian Evaluasi Tingkat Pelaksanaan Konsep Smart City di Kota Bandung berfokus pada evaluasi disetiap pilar sudah sejauh mana tingkat pelaksanaannya perbedaan dengan penelitian ini hanya membahas evaluasi pilar smart governancenya. Dengan demikian, penelitian tentang Smart Governace walaupun mempunyai variabel yang berbeda tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu memantau sejauh mana pelaksanaan Smart Governance agar dapat meningkatkan digitalisasi pelayanan publik.

#### **1.5. Tujuan.**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisis realisasi pelaksanaan Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan pelaksanaan program Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam riset ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran berupa deskripsi tentang Evaluasi Pelaksanaan Smart City di Kota Kediri yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Sedangkan dengan pendekatan induktif penelitian yang dilakukan akan bersifat terperinci dan menyeluruh. Keduanya memberikan kesempatan bagi peneliti melakukan observasi pada obyek penelitian secara langsung yang lebih efektif dan efisien. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data utama adalah kata-kata oleh orang yang



diwawancarai selaku pihak yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Smart City di Kota Kediri, terdapat 7 orang yaitu Sekretaris Dinas Diskominfo Kota Kediri, Kabid Tata Kelola Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik, Kabid Aplikasi Informatika (Koordinator Smart Governance), Kasi Tata Kelola TIK (Lama), Kasi Tata Kelola TIK (Baru), Kasi Pelayanan Informasi Publik, Staf Ahli Bidang Smart Governance. Adapun, penelitian ini penulis mengevaluasi program menggunakan teknik analisis data dari Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata., SH, MH, M.S yaitu teknis analisis ASOCA.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Evaluasi Program Smart Governance Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>ABILITY (KEMAMPUAN)</b>	<b>STRENGTH (KEKUATAN)</b>	<b>AGILITY (KECERDASAN)</b>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemkot Kediri secara prosedur pengelolaan layanan masih terdapat hambatan</li> <li>- Kemampuan aparatur Diskominfo dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Kelembagaan</li> <li>- Adanya regulasi yang sudah resmi ditetapkan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan publik</li> </ol>
<b>OPPORTUNITES (PELUANG)</b>	<b>Strategi AbO</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi AgO</b>

<p>- Berkolaborasi dengan OPD terkait</p>	<p><b>(A)</b></p> <p>a. Mendayagukan kemampuan aparatur Diskominfo Kota Kediri untuk memperbaiki hambatan dengan berkolaborasi dengan OPD terkait dalam memberikan pelayanan program smart governance</p> <p>b. Meningkatkan lagi target yang akan dicapai dengan bekerjasama dengan OPD terkait.</p>	<p><b>(C)</b></p> <p>a. Dalam menjalankan kerjasama dengan OPD terkait tidak lepas dari suatu struktur kelembagaan Yang handal dan dapat saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya</p> <p>b. Diskominfo Kota Kediri beserta dengan OPD terkait menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan</p>	<p><b>(E)</b></p> <p>a. Memanfaatkan kecerdasan aparatur dalam menciptakan inovasi program smart governance sesuai dengan SPBE untuk menciptakan inovasi baru yang dikembangkan bersama OPD terkait.</p>
<p><b>CULTURE (BUDAYA)</b></p>	<p><b>Strategi AbC</b></p>	<p><b>Strategi SC</b></p>	<p><b>Strategi AgC</b></p>
<p>1. Kebiasaan pegawai yang bekerja dengan tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas rencana kerjanya</p>	<p><b>(B)</b></p> <p>a. Memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang tersedia untuk mengoptimalkan budaya kerja yang sudah tertib dan tanggung jawab aparatur untuk meningkatkan kemampuan melayani aparatur Diskominfo Kota Kediri</p>	<p><b>(D)</b></p> <p>a. Memanfaatkan regulasi yang ada untuk membuat pegawai selalu tertib dan bertanggung jawab dalam bekerja.</p>	<p><b>(F)</b></p> <p>a. Mendayagunakan pegawai yang bekerja dengan tertib dan bertanggung jawab untuk memberikan inovasi baru dalam pelayanan publik</p> <p>b. Menciptakan inovasi yang bisa mengontrol kinerja pegawai</p>



--	--	--	--

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur**

Faktor yang mendukung Pelaksanaan Program Smart Governance Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri adalah

- Peraturan perundang-undangan, terutama Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Indikator Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan sistem penghubung layanan telah tersedia cukup baik.
- Indikator yang kuat dari Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri
- Pemerintah Kota Kediri kuat dan matang dalam Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- Tim Smart Governance dan tim pengarah SPBE melaksanakan tugas dan fungsi secara keseluruhan dengan baik.
- Sudah meratanya akses internet di Kota Kediri

Faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Smart Governance Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri adalah

- Pemerintah Kota Kediri masih belum cukup kuat membuktikan dokumen bukti dukung terkait indikator layanan jaringan intra secara jelas dan rinci.
- Pemerintah Kota Kediri masih belum cukup kuat membuktikan dokumen bukti dukung terkait indikator Audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE secara jelas dan rinci.
- Pemerintah Kota Kediri masih belum memiliki perencanaan strategis SPBE dalam ruang lingkup Rencana dan Anggaran secara jelas dan rinci.
- Pemkot Kediri secara prosedur pengelolaan layanan pusat data belum cukup komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten serta didukung pengendalian terpusat yang dimonitor aktivitasnya dan direncanakan pengembangan kapasitasnya dan kesiapan terintegrasi dengan pusat data nasional. Selain itu integrasi aplikasi khusus dan umum belum melingkupi semua proses bisnis
- Pemikiran masyarakat yang masih tergolong tradisional.

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Program Smart Governance Di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur**

- Membentuk Sumber Daya Manusia yang mumpuni
- Peningkatan Dukungan Anggaran Tunjangan bagi Aparatur
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Berbasis Teknologi

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengevaluasi pelaksanaan smart governance di Kota Kediri, apa saja program yang tidak dijalankan, yang dijalankan, dan inovasi-inovasi baru yang dibuat. Selain itu, terdapat 6 strategi yang ditemukan penulis untuk meningkatkan pelaksanaan program

tersebut hasil dari analisis strategi ASOCA. Penulis juga menemukan faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan program smart governance tersebut

#### IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan program smart governance di Kota Kediri dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik namun tetap harus ada pembaharuan dalam setiap aspek programnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri mendapat tugas tanggung jawab terkait Indeks SPBE fokus terhadap aplikasi aplikasi informatika. Sebelum masa pandemi, sudah banyak aplikasi di Kota Kediri karena Kota Kediri menjadi Kota Smart City yang mengharuskan pintar dalam pengelolaan tata kelola pemerintahannya menggunakan digitalisasi. Kemudian pada tahun 2020-2021 Kota Kediri dilanda pandemi covid-19, sehingga masterplan smart city mengalami perubahan disesuaikan dengan RPJMD yang mengakibatkan beberapa program tidak bisa dijalankan namun harus memberikan inovasi terbaru demi keperluan adaptif menghadapi covid-19. Beberapa inovasi aplikasi tersebut diantaranya: Aplikasi Cek Bansos, Aplikasi Tracing, Aplikasi Si Jamal, Aplikasi Tilang Covid, Website Deteksi Corona, Sebaran Covid, Aplikasi SIGAP, dan masih banyak lagi. Aplikasi – aplikasi ini membantu Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan publik. Keberhasilan program smart governance ini juga dilihat dari prosentase jumlah aplikasi terintegrasi. Pada tahun 2020 sebesar 30,26 persen sebanyak 29 jumlah aplikasi terintegrasi dengan layanan aplikasi SPBE lainnya, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,5 persen sebanyak 43 aplikasi terintegrasi dengan layanan aplikasi SPBE lainnya. Namun, indeks SPBE keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 3,49 menjadi 3,06 di tahun 2021.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Sehingga hal ini membuat peneliti hanya menemukan permasalahan di permukaan dan belum digali secara lebih rinci.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan program smart governance di Kota Kediri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata., SH, MH, M.S selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Drs. M. Zubakhrum B. Tjenreng, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Drs. Suropto, M.Si selaku Dosen Penelaah dan juga ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/259/419.033/2020 Tentang Tim Pelaksana Smart City 2020

### **Buku-buku**

Alkin, M. C. (1969). *Evaluation Theory Development*. Los Angeles : UCLA CSE Evaluation Comment.

Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Fruchey. (1973). *Evaluation What it is Evaluation in Extension*. United State Department of Agriculture.

I Putu Agus Eka Pratama, S. M. (2014). *Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi – Teknologi Pendukung Lainnya*. 582.

Kumar, T. V. (2015). *E-governance for smart cities*. In *E-governance for smart cities*. Springer.

Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Marrus, & Stephanie. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_ (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_ (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Pasaribu, I. ., & Simandjuntak, B. (1980). *Proses Belajar Mengajar*. Rasito.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suradinata, E. (2013). *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Alqaprint.

Tahir, M. M., & Harakan, A. (2018). *Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar*.

Winkle, W. . (1987). *Psikologi Pengajaran*. PT Gramedia.

Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal**

Irfan, I., Rahim, S., & Nasrulhaq, N. (2018). Pelaksanaan Smart Government Di Kabupaten Soppeng. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*

Jasmin, P. M. (2020). *Implementasi Smart Governance oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Qlue di Tahun 2019*.

Nurul Aini, S., & Syaodih, E. (2019). Evaluasi Tingkat Pelaksanaan Konsep Smart City di Kota



Bandung. *Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota*

### Sumber Lainnya

*Smart City Kota Kediri*. (n.d.). Retrieved September 28, 2021, from <http://smartcity.kedirikota.go.id/>

*Website Resmi Pemerintah Kota Kediri*. (n.d.). Retrieved September 28, 2021, from <https://www.kedirikota.go.id/>

*Diskominfo Kota Kediri*. (n.d.). Retrieved September 28, 2021, from <https://diskominfo.kedirikota.go.id/>

**Nb: Jika daftar pustaka sudah menggunakan references manajemen seperti mendeley, Zotero dll kami apresiasi lebih, ketimbang yang tidak. Terimakasih..**

